

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ali, C. (2020). *Badan hukum*. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum tata negara dan pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2020). *Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam*. Mizan.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2021). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Damsar. (2021). *Sosiologi ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Kencana.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Rineka Cipta.
- Hadjon, P. M., dkk. (2021). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hasballah, A. (2021). *Siyasah syar'iyah*. RajaGrafindo Persada.
- Hoetoro, A. (2021). *Ekonomi koperasi Indonesia*. UB Press.
- Huda, N. (2021). *Hukum pemerintahan desa*. FH UII Press.
- Indrati S., M. F. (2022). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh siyasah kontekstual*. Prenadamedia Group.
- Khallaf, A. W. (2021). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Amani.
- Kuncoro, M. (2021). *Ekonomi pembangunan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mannan, A. (2021). *Islamic economics: Theory and practice*. Adam Publishers.

- Mochtar, Z. A. (2021). *Dualisme kelembagaan dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nugroho, R. (2021). *Governance dan administrasi publik*. Gramedia.
- Nurcholis, H. (2022). *Pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2021). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Prasojo, E. (2021). *Reformasi birokrasi dalam praktik*. Prenadamedia Group.
- Pulungan, J. S. (2021). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2023). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2021). *Good governance (kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2020). *Hukum dalam masyarakat*. Gramedia.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sutoro, E. (2020). *Desa membangun Indonesia*. IRE Press.
- Sutoro, E. (2020). *Regulasi desa dan BUMDes*. IRE Press.
- Syafiie, I. K. (2020). *Ilmu pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
- Thoha, M. (2020). *Birokrasi dan governance di Indonesia*. Kencana.
- Wijaya, D. (2018). *BUM Desa: Badan usaha milik desa*. Gava Media.
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. CAPS.
- Zainuddin, A. (2022). *BUMDes dan pemberdayaan ekonomi desa*. UB Press.

Skripsi dan Jurnal

- Arzewiniga, F. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan koperasi desa merah putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2).
- Fauzi, A. (2022). *Tumpang tindih kewenangan lembaga desa pasca regulasi ekonomi desa*.
- Febrina, R., Marta, A., Amin, R. M., & Hadi, S. (2024). Economic development and the rural environment: BUMDES development strategy. *E3S Web of Conferences*, 506.
- Frastiwi, Y. S. (2025). Kekerasan struktural dalam proses percepatan koperasi merah putih. *TheJournalish: Social and Government*, 6(4).
- Hasanah, N. (2023). *Pengelolaan BUMDes dalam perspektif maqashid asy-syari'ah*.
- Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembentukan koperasi desa merah putih melalui instruksi presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2).
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah syariyah dan fiqh siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2).
- Lestari, D. (2021). *Eksistensi koperasi desa dalam sistem hukum perkoperasian Indonesia*.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1).
- Pratama, R. (2020). *Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal*.
- Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi desa merah putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2).
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Sukarno, K. S., Nurviana, R., Buana, N., & Evi, S. (2025). Sosialisasi dan pendampingan hukum pendirian koperasi desa merah putih. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).

Suryono, B. (2024). *Kebijakan pemerintah desa dan efektivitas lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*.

Sutrisna, I W. (2021). Eksistensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi di desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.